

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu, jawaban, segala sesuatu yang bersangkutan dengan jabatan (Pemerintah), bukan swasta, bertugas dan bekerja. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan suatu instansi yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

APBD merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Berdasarkan hasil magang dapat diketahui bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam proses anggaran pendapatan dan belanja daerah DPPKA Kabupaten Tanah Datar meliputi :

1. Penyusunan rancangan APBD, terdiri dari :
 - a. Rencana kerja pemerintah daerah
 - b. Kebijakan umum APBD
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
 - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

- e. Penyiapan Raperda APBD
- f. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- i. Perubahan APBD

2. Penetapan APBD

Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:

- 1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
- 2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.



1.2. Saran

Selama pelaksanaan magang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar, penulis melihat beberapa kekurangan yang kedepannya diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mengawasi jalannya proses anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar.
2. Semenjak diberlakukannya sistem pelaporan keuangan berbasis informasi dan teknologi, diharapkan dilaporan secara manual tidak dilakukan lagi karena dianggap tidak efisien.
3. Jaringan koneksi internet untuk melakukan pelaporan diharapkan tidak sering mengalami gangguan lagi, karena dapat mengganggu transaksi-transaksi keuangan daerah.
4. Masih kurangnya rasa menjunjung tinggi dan kedisiplinan serta kurangnya tanggung jawab kerja. Maka dari itu hendaknya ada pemberian sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar itu semua.

